BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang di Bappeda Kota Bandung merupakan suatu penerapan teknologi informasi yang bertujuan untuk menunjang pekerjaan supaya proses pengerjaan maupun hasil yang diharapkan dapat segera tercapai dengan waktu yang singkat. Pemanfaatan sistem informasi ini pun sangat menunjang kegiatan aparatur Bappeda Kota Bandung didalam melaksanakan tugas serta kewajibannya didalam menyelenggarakan Musrenbang di Kota Bandung. Pelayanan yang optimal didalam menyelenggarakan Musrenbang sangat diharapkan oleh segenap aparatur maupun masyarakat yang turut serta didalam pelaksanaan Musrenbang supaya hal tersebut dapat membawa pembangunan kearah yang lebih baik lagi melalui perencanaan-perencanaan yang telah disepakati bersama.

Peneliti mencoba menganalisis mengenai hubungan implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang yang diterapkan di Bappeda Kota Bandung tersebut yang hubungannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menyelenggarakan Musrenbang Kota Bandung pada tahun 2011. Hal ini merupakan kajian yang menurut peneliti sangat berarti terlebih hal ini juga merupakan suatu tugas akhir bagi peneliti didalam menyelesaikan studinya.

Langkah pertama untuk dapat memulai penganalisaan yaitu dengan mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada peserta

Musrenbang Kota Bandung tahun 2011 yang dimana kuesioner tersebut penilaiannya menggunakan *skala likert* dengan ketentuan pemberian skor yang telah ditetapkan.

Jumlah responden dalam penelitian ini sejumlah 77 orang serta kuesioner terdiri dari 45 pernyataan yang terbagi atas dua bagian atau variabel. Varibel pertama yang merupakan variabel X, yaitu implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang yang terdiri dari 26 pernyataan. Variabel kedua yang merupakan variabel Y, yaitu kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung yang.terdiri dari 19 pernyataan. Penganalisaan dimulai dengan mencari frekuensi serta persentase jawaban responden atas tanggapannya terhadap kuesioner yang telah diberikan. Analsisnya mencari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal supaya dapat mengetahui peringkat dari persentase yang telah dihasilkan dari perhitungan tersebut.

Penganalisaan berikutnya yaitu didalam mencari hubungan atau korelasi antara variabel X dan variabel Y. Analisa yang pada akhirnya mencari besaran nilai koefisien determinasi. Peneliti, didalam mencari besarnya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat digunakan rumus analisis korelasi non-parametris yaitu korelasi *rank spearman.* Korelasi tersebut di proses dengan alat bantu program *IBM SPSS Statistic 19.* Termasuk didalam mencari validitas dan reliabilitas data.

4.1 Hasil Analisis Implementasi Kebijakan *e-Government* tentang Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung

Sebanyak 26 butir pernyataan mengenai implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang yang diajukan kepada responden untuk menilai bagaimana implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang tersebut yang tengah berjalan di Bappeda Kota Bandung. Angket terdiri dari 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/kecenderungan, dan struktur birokrasi.

4.1.1 Komunikasi Bappeda Kota Bandung

Proses komunikasi di Bappeda Kota Bandung merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan *(policy maker)* kepada pelaksana kebijakan *(policy implementors).* Ruang lingkup komunikasi tersebut yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Komunikasi mengenai Keterbukaan Penyampaian Informasi Usulan-Usulan Musrenbang**

   Keterbukaan penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang merupakan suatu upaya kegiatan transparansi aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menjalankan tugas serta fungsinya melaksanakan Musrenbang di Kota Bandung supaya hal tersebut dapat memberikan informasi aktual serta dapat diketahui oleh publik.

Tabel 4.4
Tanggapan Responden mengenai Keterbukaan
Penyampaian Informasi Usulan-Usulan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	26	130	33.8%	85,71%
Setuju	4	47	188	61.0%	
Ragu-Ragu	3	4	12	5.2%	
Tidak Setuju	2	0	0	0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%	
Jumlah		**77**	**330**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap keterbukaan penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang sebanyak 47 orang menjawab setuju. Keterbukaan penyampaian informasi sangat diperlukan dan bermanfaat didalam proses pelaksanaan Musrenbang. Persentase skor sebesar 85,71 % terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa keterbukaan penyampaian informasi mengenai usulan-usulan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan keterbukaan penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang seperti usulan rencana pengadaan maupun pembangunan infrastruktur. Usulan-usulan Musrenbang telah dilaksanakan dengan terbuka sehingga sangat memudahkan proses pelaksanaan Musrenbang.

2. Komunikasi mengenai Pertanggungjawaban Penyampaian Informasi Usulan-Usulan Musrenbang

Pertangungjawaban penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan terkait dengan suatu kewajiban

aparatur Bappeda Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini biasa dikenal sebagai akuntabilitas aparatur terhadap publik.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden mengenai Pertanggungjawaban Penyampaianan Informasi Usulan-Usulan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	25	125	32.5%	86,23%
Setuju	4	41	164	53.2%	
Ragu-Ragu	3	11	33	14.3%	
Tidak Setuju	2	0	0	0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%	
Jumlah		**77**	**322**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pertanggungjawaban penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang sebanyak 41 orang menjawab setuju. Pertanggungjawaban penyampaian informasi sangat diperlukan supaya informasi usulan-usulan Musrenbang tetap dapat diakses. Persentase skor sebesar 86,23 % terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pertanggungjawaban penyampaian informasi mengenai usulan-usulan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan pertanggungjawaban penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang. Pertanggungjawaban tersebut menjaga agar informasi usulan-usulan Musrenbang benar adanya. Penyampaian informasi Usulan-usulan Musrenbang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

3. Komunikasi mengenai Pelaksanaan Persyaratan Teknis Musrenbang

Pelaksanaan persyaratan teknis Musrenbang merupakan suatu persiapan aparatur Bappeda Kota Bandung didalam mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis seperti peralatan maupun tempat yang perlu untuk dapat dipersiapkan dengan baik supaya pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Persyaratan Teknis Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	16	80	20.8%	80,00%
Setuju	4	45	180	58.4%	
Ragu-Ragu	3	16	48	20.8%	
Tidak Setuju	2	0	0	0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%	
Jumlah		**77**	**308**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pelaksanaan persyaratan teknis Musrenbang sebanyak 45 orang menjawab setuju. Persyaratan teknis Musrenbang berguna untuk dapat menunjang kegiatan Musrenbang. Persentase skor sebesar 80% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa persyaratan teknis Musrenbang telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan Musrenbang telah terealisasi dengan pelaksanaan persyaratan teknis yang memadai seperti penyediaan dana, tempat maupun alat komunikasi. Persyaratan teknis Musrenbang dapat dilaksanakan sehingga memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

4. Komunikasi mengenai Peran Aktif Unit Kerja didalam Pelaksanaan Musrenbang

Peran aktif unit kerja didalam pelaksanaan Musrenbang merupakan suatu hal yang perlu untuk dapat dilakukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat dikerjakan dengan baik dan lancar. Hal ini pun merupakan suatu tuntutan terhadap aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menjalankan tugas serta fungsinya.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden mengenai Peran Aktif Unit Kerja didalam Pelaksanaan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	35	175	45.50%	88,57%
Setuju	4	40	160	51.90%	
Ragu-Ragu	3	2	6	2.60%	
Tidak Setuju	2	0	0	0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0%	
Jumlah		**77**	**341**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap peran aktif unit kerja didalam pelaksanaan Musrenbang sebanyak 40 orang menjawab setuju. Peran aktif unit kerja diperlukan supaya dalam proses pelaksanan Musrenbang tercipta suatu kerjasama yang solid. Persentase skor sebesar 88,57% terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa peran aktif unit kerja didalam pelaksanaan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang telah terealisasi dengan peran aktif unit kerja yang telah mematuhi dan mengerjakan kewajiban sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Unit kerja telah berperan dengan sangat baik sehingga pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan dengan baik.

5. Komunikasi mengenai Konsistensi Pelaksanaan Musrenbang

Konsistensi pelaksanaan Musrenbang merupakan suatu kegiatan yang tetap dijalankan sesuai dengan jalur yang memang terus dilakukan. Hal ini juga merupakan suatu hal yang diharapkan supaya kegiatan Musrenbang supaya dapat terus dilakukan sebagai upaya memenuh amanat nasional didalam perencanaan pembangunan.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden mengenai Konsistensi Pelaksanaan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	20	100	26.0%	82,07%
Setuju	4	45	180	58.4%	
Ragu-Ragu	3	12	36	15.6%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**316**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap konsistensi pelaksanaan Musrenbang sebesar 58.4% menjawab setuju. Konsistensi pelaksanaan Musrenbang diperlukan mengingat hal ini adalah amanat yang harus dikerjakan. Persentase skor sebesar 82,07% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa konsistensi pelaksanaan Musrenbang telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan konsisten dilakukan tiap tahun dalam memenuhi amanat nasional. Konsistensi pelaksanaan Musrenbang telah dilakukan Bappeda Kota Bandung yang merupakan badan yang mempunyai tugas untuk merencanakan pembangunan daerah di Kota Bandung. Konsistensi ini telah dilakukan dengan baik sehingga perencanaan pembangunan tetap selalu digelar.

6. Komunikasi mengenai Kesamaan tujuan didalam Pelaksanaan Musrenbang

Kesamaan tujuan didalam pelaksanaan Musrenbang merupakan sifat yang menyatukan tindakan didalam mencapai tujuan untuk menghasilkan hasil yang telah diharapkan. Hal ini pun merupakan sesuatu yang diinginkan supaya tercipta suatu kerjasama yang solid diantara para aparat didalam melakukan fungsinya.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden mengenai Kesamaan Tujuan didalam Pelaksanaan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	33	165	42.9%	87,53%
Setuju	4	40	160	51.9%	
Ragu-Ragu	3	4	12	5.2%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**337**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesamaan tujuan didalam pelaksanaan Musrenbang sebanyak 40 orang menjawab setuju. Kesamaan tujuan seperti visi maupun misi perlu untuk dapat dilakukan supaya pelaksanaan Musrenbang terealisasi dengan terstruktur. Persentase skor sebesar 87,53% terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesamaan tujuan didalam pelaksanaan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Kesamaan tujuan aparatur Bappeda Kota Bandung seperti didalam memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan internal daerah telah membantu mempermudah pelaksanaan Musrenbang.

Komunikasi dapat terselesaikan dan diakumulasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Akumulasi Tanggapan Responden mengenai Komunikasi

No	Sub Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
1	Keterbukaan	330	385	85,71%	Sangat Baik
2	Pertanggungjawaban	322	385	86,23%	Sangat Baik
3	Persyaratan Teknis	308	385	80,00%	Baik
4	Unit Kerja	341	385	88,57%	Sangat Baik
5	Konsistensi	316	385	82,07%	Baik
6	Kesamaan	337	385	87,53%	Sangat Baik
Total		**1954**	**2310**		

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{1954}{2310} \times 100\%$$

% Skor Aktual = 84.59%

Komunikasi yang tercipta di Bappeda Kota Bandung telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas yang mencapai nilai sejumlah 84.59% yang termasuk kedalam kriteria yang sangat baik. Peran Aktif Unit Kerja didalam Pelaksanaan Musrenbang memiliki persentase yang paling tinggi yaitu sebesar 88,57% yang terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Unit Kerja aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Peran aktif unit kerja telah mematuhi dan mengerjakan kewajiban sesuai dengan bidang dan

tugasnya masing-masing. Aparat telah berperan dengan sangat baik sehingga pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan dengan lancar.

Komunikasi yang dilaksanakan di Bappeda Kota Bandung didalam menunjang pelaksanaan Musrenbang telah terjalin dengan baik. Komunikasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi usulan-usulan Musrenbang, pertanggungjawaban, persyaratan teknis, peran aktif unit kerja aparatur maupun konsistensi hingga kesamaan tujuan didalam melaksanakan tugas telah terlaksana dengan memperhatikan himbauan atasan dan ketentuan yang berlaku. Aparatur telah melakukannya dengan benar sehingga tercipta suasana komunikasi yang benar-benar kondusif. Komunikasi ini terjalin secara berkoordinasi satu sama lain dengan tetap menjaga tugas serta kewajiban di bidangnya masing-masing.

4.1.2 Sumber Daya Bappeda Kota Bandung

Sumber daya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diadakan mengingat hal ini merupakan sesuatu yang amat menunjang berbagai kegiatan dan keperluan para aparat Bappeda Kota Bandung didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun ruang lingkup sumber daya tersebut yang berperan dalam menunjang keberhasilan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Sumber daya mengenai Kesesuaian Perekrutan Aparat dengan Peraturan yang Berlaku**

   Kesesuaian perekrutan aparat dengan peraturan yang berlaku merupakan upaya untuk menempatkan calon aparat supaya dapat bekerja pada bidangnya

masing-masing sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan keahliannya masing-masing serta menghasilkan hal yang memuaskan. Hal ini biasa disebut sebagai perekrutan *the right man on the right place*.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian
Perekrutan Aparat dengan Peraturan yang Berlaku

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	25	125	32.5%	82,59%
Setuju	4	40	160	51.9%	
Ragu-Ragu	3	9	27	11.7%	
Tidak Setuju	2	3	6	3.9%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**318**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesesuaian perekrutan aparat dengan peraturan yang berlaku sebanyak 40 orang menjawab setuju. Persentase skor sebesar 82,59% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesesuaian perekrutan aparat dengan peraturan yang berlaku telah dilakukan dengan baik. Perekrutan aparat di Bappeda Kota Bandung telah memenuhi kriteria yaitu melalui penseleksian terlebih dahulu seperti penseleksian calon Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Penseleksian tersebut menghasilkan tenaga ahli yang telah diposisikan pada pekerjaan sesuai dengan keahliannya sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan benar.

2. Sumber Daya mengenai Kesesuaian Penempatan Aparat dengan Keahlian dibidangnya

Kesesuaian aparat dengan keahlian dibidangnya merupakan sesuatu hal yang memang sedang menjadi polemik hingga kini. Hal jika ditinjau dari pengertiannya merupakan suatu perekrutan aparat pemerintah supaya dapat ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan keahliannya.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Penempatan Aparat dengan Keahlian dibidangnya

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	25	125	32.5%	82,85%
Setuju	4	40	160	51.9%	
Ragu-Ragu	3	10	30	13.0%	
Tidak Setuju	2	2	4	2.6%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**319**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesesuaian penempatan aparat dengan keahlian dibidangnya sebanyak 40 orang menjawab setuju. Kesesuaian penempatan aparat dengan keahlian dibidannya diperlukan supaya pekerjaan terlaksana dengan baik karena dikerjakan oleh ahlinya. Persentase skor sebesar 82,85% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesesuaian penempatan aparat dengan keahlian dibidangnya telah terlaksana dengan baik. Penempatan aparat dibidangnya telah sesuai dengan keahliannya masing-masing karena telah melalui proses penseleksian terlebih dahulu seperti penseleksian calon Pegawai Negeri Sipil pada umumnya.

3. Sumber Daya mengenai Pengolahan Data Usulan Musrenbang

Pengolahan data usulan Musrenbang merupakan kegiatan meninjau data-data yang telah diperoleh dari hasil pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung. Hal ini pun dapat dikatakan sebagai suatu informasi hasil dari olah data dari pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung.

Tabel 4.13
Tanggapan Responden mengenai
Pengolahan Data Usulan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	32	160	41.6%	86,23%
Setuju	4	37	148	48.1%	
Ragu-Ragu	3	8	24	10.4%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**332**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pengolahan data usulan Musrenbang sebanyak 37 orang menjawab setuju. Persentase skor sebesar 86,23% terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pengolahan data usulan Musrenbang dalam pelaksanaannya telah dilakukan dengan sangat baik. Pengolahan data usulan Musrenbang seperti data primer yang dilakukan dengan seksama melalui pemanfaatan teknologi komputer telah membantu mempermudah serta memperlancar pelaksanaan Musrenbang. Pengolahan data usulan Musrenbang dikerjakan oleh aparat Bappeda Kota Bandung secara baik dan benar. Olahan data tersebut yang kemudian di *upload* ke dalam sistem informasi Musrenbang untuk dapat dipublikasikan kepada publik.

4. Sumber Daya mengenai Perekapan Data Hasil Musrenbang

Perekapan data hasil Musrenbang merupakan kegiatan untuk memastikan dan mendokumentasikan kegiatan dari hal tersebut untuk bahan rekomendasi hasil kinerja aparat pemerintah. Hal ini biasa digunakan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perekapan data penting sekali dilakukan supaya dapat mengetahui hasil yang pasti dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh aparat Bappeda Kota Bandung.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden mengenai
Perekapan Data Hasil Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	18	90	23.4%	81,29%
Setuju	4	46	184	59.7%	
Ragu-Ragu	3	13	39	16.9%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**313**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap perekapan data hasil Musrenbang sebesar 59.7% menjawab setuju. Persentase skor sebesar 81,29% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Perekapan data sangat penting untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa perekapan data hasil Musrenbang telah terlaksana dengan baik. Perekapan data seperti menghitung jumlah peserta yang hadir telah dilakukan dengan seksama. Data hasil Musrenbang telah direkap sedemikian rupa sehingga data-data hasil pelaksanaan Musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perekapan data hasil Musrenbang ini sehingga mempermudah pekerjaan mengunggah data

tentang Musrenbang pada sistem informasi Musrenbang yang akan dipublikasikan.

5. Sumber Daya mengenai Pengerjaan Urusan Kebijakan dalam Musrenbang

Pengerjaan urusan kebijakan dalam Musrenbang merupakan suatu kegiatan didalam melaksanakan tugas seorang aparatur. Hal ini pun sebagai upaya memenuhi kewajibannya mengenai berbagai urusan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden mengenai
Pengerjaan Urusan Kebijakan dalam Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	23	115	29.9%	83,11%
Setuju	4	43	172	55.8%	
Ragu-Ragu	3	11	33	14.3%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**320**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesamaan tujuan didalam pelaksanaan Musrenbang sebanyak 43 orang menjawab setuju. Pengerjaan urusan kebijakan dalam Musrenbang sangat perlu untuk dapat dilakukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan dengan baik dan benar. Persentase skor sebesar 83,11% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pengerjaan urusan kebijakan dalam Musrenbang telah dilakukan dengan baik. Urusan kebijakan dalam Musrenbang seperti didalam

pengalokasian waktu penyelenggaraan maupun persyaratan teknis telah membantu mempermudah pelaksanaan Musrenbang.

6. Sumber Daya mengenai Penerapan Keputusan Kebijakan dalam Musrenbang

Penerapan keputusan kebijakan dalam Musrenbang merupakan aplikasi mengenai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Hal ini untuk dapat diterapkan didalam pelaksanaan Musrenbang supaya dapat berjalan dengan baik.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden mengenai Penerapan Keputusan Kebijakan dalam Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	23	115	29.9%	84,15%
Setuju	4	47	188	61.0%	
Ragu-Ragu	3	7	21	9.1%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**324**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden mengenai penerapan keputusan kebijakan dalam Musrenbang sebesar 61.0% pada jawaban setuju. Penerapan keputusan kebijakan dlam Musrenbang diperlukan untuk mengkondisikan pelaksanaan Musrenbang. Persentase skor sebesar 84,15% terdapat pada penilaian yang sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa penerapan keputusan kebijakan dalam Musrenbang telah terlaksana dengan sangat baik. Keputusan kebijakan seperti penetapan ketentuan didalam pelaksanaan Musrenbang telah membantu

menertibkan kegiatan Musrenbang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan harmonis.

7. Sumber Daya mengenai Ketersediaan Dana yang Memadai dalam Menunjang Musrenbang

Ketersediaan dana yang memadai dalam menunjang Musrenbang merupakan penggalangan dana yang memang telah ditetapkan sesuai ketentuan berlaku, yang dimana dana pelaksanaan Musrenbang bersumber dari dana APBD dan bukan dana yang bersumber dari dana perseorangan aparatur Bappeda Kota Bandung.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden mengenai Ketersediaan Dana yang Memadai dalam Menunjang Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	23	115	29.9%	82,33%
Setuju	4	41	164	53.2%	
Ragu-Ragu	3	12	36	15.6%	
Tidak Setuju	2	1	2	1.3%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**317**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap ketersediaan dana yang memadai dalam menunjang Musrenbang sebanyak 41 orang menjawab setuju. Ketrsediaan dana yang memadai dalam menunjang Musrenbang sangat perlu terpenuhi supaya Musrenbang dapat terealisasi dengan baik. Persentase skor sebesar 82,33% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa ketersediaan dana yang memadai dalam menunjang Musrenbang telah

terpenuhi. Ketersediaan dana untuk melaksanakan Musrenbang yang bersumber dari APBD telah tercukupi. Ketersediaan dana didalam melaksanakan Musrenbang Kota Bandung yang diselenggarakan aparatur Bappeda Kota Bandung telah terpenuhi sehingga pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung tahun 2011 dapat digelar dengan baik.

8. Sumber Daya mengenai Pengadaan Perangkat Komputer dalam Menunjang Pelaksanaan Musrenbang

Pengadaan perangkat komputer dalam menunjang pelaksanaan Musrenbang merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sekali dilakukan mengingat hal ini amat penting perannya didalam mendukung pelaksanaan Musrenbang yang berbasis teknologi informasi supaya Musrenbang dapat terealisasi dengan adanya keterbukaan kepada publik.

Tabel 4.18
Tanggapan Responden mengenai Pengadaan Perangkat Komputer dalam Menunjang Pelaksanaan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	20	100	26.0%	80,51%
Setuju	4	39	156	50.6%	
Ragu-Ragu	3	18	54	23.4%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**310**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pengadaan perangkat komputer dalam menunjang pelaksanaan Musrenbang sebanyak 39 orang menjawab setuju. Persentase skor sebesar 80,51% terdapat pada kriteria penilaian yang baik.

Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pengadaan perangkat komputer dalam menunjang pelaksanaan Musrenbang telah terpenuhi. Pengadaan perangkat komputer dalam menunjang pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung telah terpenuhi sehingga sangat membantu mempermudah pelaksanaan Musrenbang.

9. Sumber daya mengenai Ketersediaan Printer dalam Menunjang Pelaksanaan Musrenbang

Ketersediaan *printer* dalam menunjang pelaksanaan Musrenbang merupakan bagian yang penting untuk memfasilitasi kegiatan Musrenbang. Hal ini supaya lebih *modern* dan cepat dibandingkan dengan menggunakan mesin tik yang hasilnya tidak lebih baik dibanding hasil *print out* komputer.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Ketersediaan *Printer* dalam Menunjang Pelaksanaan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	22	110	28.6%	81,03%
Setuju	4	37	148	48.1%	
Ragu-Ragu	3	18	54	23.4%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**312**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap ketersediaan printer dalam menunjang pelaksanaan Musrenbang sebanyak 37 orang menjawab setuju. Persentase skor sebesar 81,03% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa ketersediaan printer dalam menunjang pelaksanaan Musrenbang telah terpenuhi. Penyediaan printer di Bappeda Kota Bandung dalam

menunjang pelaksanaan Musrenbang telah terpenuhi. Printer telah mempermudah berbagai pengerjaan tugas aparatur seperti membuat surat dan lainnya. Printer pun telah menjadi penunjang didalam mendokumentasikan kegiatan Musrenbang yang berupa *print out*.

10. Sumber Daya Mengenai Penyediaan Internet dalam Menunjang Kebijakan

Penyediaan internet dalam menunjang kebijakan merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali. Hal ini mengingat Musrenbang yang kini telah berbasis teknologi informasi tentu dukungan internet sangat diperlukan untuk menunjang proses pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 4.20
Tanggapan Responden mengenai Penyediaan Internet dalam Menunjang Kebijakan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	31	155	40.3%	86,75%
Setuju	4	41	164	53.2%	
Ragu-Ragu	3	5	15	6.5%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**334**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap penyediaan internet dalam menunjang kebijakan sebanyak 41 orang menjawab setuju. Persentase skor sebesar 86,75% terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa penyediaan internet dalam menunjang kebijakan di Bappeda Kota Bandung telah terpenuhi dengan sangat baik. Internet menjadi fasilitas yang

sangat diperlukan didalam memenuhi kebutuhan didalam proses kebijakan seperti didalam mempublikasikan berbagai kegiatan pada *website*. Internet pun menjadi kebutuhan didalam meng-*upload data* hasil kegiatan Musrenbang. Internet telah tersedia dan memenuhi kegiatan kebijakan serta mempermudah pelaksanaan kebijakan khususnya didalam keperluan mempublikasikan hasil Musrenbang.

Tanggapan responden mengenai Sumber daya yang terdiri dari perekrutan, penempatan, olah data, rekap data, urusan, keputusan, dana, perangkat komputer, printer, dan internet telah diakumulasikan dan diperhitungkan persentase skor aktualnya. Adapun akumulasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21
Akumulasi Tanggapan Responden mengenai Sumber Daya

No	Sub Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor	Kriteria
1	Perekrutan	318	385	82,59%	Baik
2	Penempatan	319	385	82,85%	Baik
3	Olah Data	332	385	86,23%	Sangat Baik
4	Rekap Data	313	385	81,29%	Baik
5	Urusan	320	385	83,11%	Baik
6	Keputusan	324	385	84,15%	Sangat Baik
7	Dana	317	385	82,33%	Baik
8	Perangkat Komputer	310	385	80,51%	Baik
9	Printer	312	385	81,03%	Baik
10	Internet	334	385	86,75%	Sangat Baik
Total		**3199**	**3850**		

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{3199}{3850} \times 100\%$$

% Skor Aktual = 83.09%

Sumber daya yang telah tersedia didalam menunjang kegiatan Musrenbang Kota Bandung di tahun 2011 oleh aparatur Bappeda Kota Bandung telah mencukupi. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan di atas yang mencapai persentase sebesar 83.09% yang termasuk pada kriteria baik. Persentase teringgi yaitu mengenai penyediaan internet dalam menunjang kebijakan sebesar 86,75% yang terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Internet menjadi fasilitas yang sangat diperlukan didalam memenuhi kebutuhan didalam proses kebijakan seperti didalam mempublikasikan berbagai kegiatan pada *website*. Internet pun menjadi kebutuhan didalam meng-*upload data* hasil kegiatan Musrenbang. Penyediaan internet yang begitu penting dan peranannya sehingga Internet disediakan untuk memenuhi kegiatan kebijakan serta mempermudah pelaksanaan kebijakan khususnya didalam memenuhi keperluan Musrenbang.

Upaya aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menyediakan sumber daya telah dilakukan dengan baik. Sumber daya tersebut sangat diperulukan didalam memenuhi kebutuhan pekerjaan para aparat sehingga disediakan untuk menunjang hal tersebut. Sumber daya yang tersedia di Bappeda telah membantu mempermudah berbagai proses pekerjaan khususnya didalam menunjang serta memenuhi keperluan mengenai pelaksanaan Musrenbang.

4.1.3 Sikap atau Kecenderungan Bappeda Kota Bandung

Sikap atau kecenderungan merupakan sesuatu hal yang menarik untuk diperhatikan karena hal ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada

implementor atau pelaksana kebijakan. Karakteristik aparatur pemerintah khususnya dalam hal ini adalah aparatur Bappeda Kota Bandung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini seperti didalam menjalankan tugas Musrenbang Kota Bandung. Sikap atau kecenderungan aparatur terkadang menjadi sesuatu hal yang menjadi perbincangan mengingat aparatur Negara dituntut untuk berlaku bersih dari patologi birokrasi. Sikap atau kecenderungan ruang lingkupnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Sikap mengenai Kesabaran Aparat Menjadi Aspek Pendukung dalam Pelaksanaan Musrenbang**

Kesabaran aparat menjadi aspek pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang merupakan hal yang normatif. Hal ini dikarenakan menyangkut perilaku didalam melakukan tugas dan kewajiban seorang aparatur Negara didalam memenuhi amanat yang telah diberikan. Kesabaran diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan, tentunya hal ini penting mengingat didalam proses suatu kegiatan diperlukan tenaga ahli yang berkompeten untuk mengurus suatu hal termasuk didalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan Musrenbang Kota Bandung.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden mengenai Kesabaran Aparat Menjadi Aspek Pendukung dalam Pelaksanaan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	35	175	45.5%	88,83%
Setuju	4	41	164	53.2%	
Ragu-Ragu	3	1	3	1.3%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**342**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesabaran aparat menjadi aspek pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang sebanyak 41 orang menjawab setuju. Kesabaran aparat merupakan hal penting untuk dapat dilakukan supaya pekerjaan dapat tercapai dengan baik. Persentase skor sebesar 88,83 % terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesabaran aparat didalam pelaksanaan Musrenbang dilakukan oleh aparat Bappeda Kota Bandung dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan oleh aparat Bappeda Kota Bandung seperti dalam persiapan maupun pengurusannya dilakukan dengan penuh kesabaran. Kesabaran aparat Bappeda Kota Bandung didalam melaksanakan tugasnya telah membantu memperlancar serta menjadi pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang.

2. Sikap mengenai Kesigapan Aparat Menjadi Prinsip Pelayanan Musrenbang

Kesigapan aparat menjadi prinsip pelayanan Musrenbang merupakan suatu hal yang dianggap perlu dikarenakan tugas seorang aparatur Negara yang dituntut

sigap didalam melaksanakan kewajiban serta fungsinya didalam menegemban amanat nasional.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden mengenai Kesigapan Aparat Menjadi Prinsip Pelayanan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	40	200	51.9%	90,38%
Setuju	4	37	148	48.1%	
Ragu-Ragu	3	0	0	0.0%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**348**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesigapan aparat menjadi prinsip pelayanan Musrenbang sebanyak 40 orang menjawab sangat setuju. Kesigapan aparat dalam menjalankan tugas sangat diperlukan dan bermanfaat didalam proses pelaksanaan Musrenbang. Persentase skor sebesar 90,38% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesigapan aparat telah dilakukan dengan sangat baik. Kesigapan aparat seperti didalam mempersiapkan keperluan Musrenbang seperti menyiapkan tempat maupun alat-alat teknis telah dilakukan dengan sangat baik. Kesigapan aparat Bappeda Kota Bandung telah memperlancar kegiatan Musrenbang sehingga Musrenbang dapat terealisasi dengan maksimal.

3. Sikap mengenai Pengangkatan Aparat yang Berdedikasi pada Kebijakan

Pengangkatan aparat yang berdedikasi pada kebijakan merupakan suatu kegiatan atau pun tindakan yang mengupayakan supaya aparat terekrut

sebagaimana mestinya. Hal itu supaya aparat tersebut mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya sebagai aparat yang melayani kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.24
Tanggapan Responden mengenai Pengangkatan Aparat yang Berdedikasi pada Kebijakan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	28	140	36.4%	84,41%
Setuju	4	38	152	49.4%	
Ragu-Ragu	3	11	33	14.3%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**325**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden mengenai pengangkatan aparat yang berdedikasi pada kebijakan sebanyak 38 orang menjawab setuju. Pengangkatan yang berdedikasi ditujukan supaya tercipta tenaga-tenaga ahli yang profesional didalam instansi. Persentase skor sebesar 84,41% terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Pengangkatan aparat telah memenuhi kriteria serta berdedikasi pada kebijakan. Dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban sangat diperlukan didalam pekerjaan. Pengangkatan aparat Bappeda yang berdedikasi pada kebijakan seperti didalam memandang kompetensi aparat didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengangkatan aparat di Bappeda Kota Bandung telah didasari dedikasi pada kebijakan sehingga kebijakan seperti didalam melaksanakan Musrenbang telah terealisasi dengan baik.

4. Sikap mengenai Pemilihan Aparat didalam Melaksanakan Musrenbang

Pemilihan aparat didalam melaksanakan Musrenbang merupakan suatu penentuan orang untuk bekerja khusus didalam melaksanakan Musrenbang dan dalam hal ini telah tersedia aparat yang bertugas sebagai pengurus Musrenbang. Sikap merupakan kebiasaan orang untuk melakukan sesuatu yang pengaruhnya terhadap hasil dan pencapaian kerja seseorang.

Tabel 4.25
Tanggapan Responden mengenai Pemilihan Aparat didalam Melaksanakan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	25	125	32.5%	80,25%
Setuju	4	28	112	36.4%	
Ragu-Ragu	3	24	72	31.2%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**309**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pemilihan aparat didalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 28 orang menjawab setuju. Pemilihan aparat didalam melaksanakan Musrenbang diperlukan supaya Musrenbang dialksanakan dengan tenaga ahli yang sesuai dalam bidangnya. Persentase skor sebesar 80,25% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pemilihan aparat dalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan memperhatikan aparat mana yang akan dijadikan sebagai panitia penyelenggara Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang telah dilakukan secara terkoordinir sehingga membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

5. Sikap mengenai Pemberian Bonus Uang kepada Para Aparat

Pemberian bonus uang kepada para aparat merupakan suatu pemberian insentif yang dimana pemberian bonus uang ini dilakukan manakala aparatur yang bekerja di suatu instansi pemerintah telah melakukan prestasi kerja yang bagus yang memikat perhatian pemerintah sehingga pemerintah pun memberikan insentif untuk dapat diberikan kepada aparat pada instansi tersebut.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden mengenai Pemberian Bonus Uang kepada Para Aparat

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	8	40	10.4%	68,83%
Setuju	4	25	100	32.5%	
Ragu-Ragu	3	40	120	51.9%	
Tidak Setuju	2	1	2	1.3%	
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	3.9%	
Jumlah		**77**	**265**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap keterbukaan penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang sebanyak 25 orang menjawab setuju. Pemberian insentif berupa bonus uang perlu untuk memberikan semangat kerja kepada para aparatur Bappeda Kota Bandung didalam melakukan pekerjaannya. Persentase skor sebesar 68,83% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pemberian bonus uang sebagai insentif kepada para aparatur telah dilakukan dengan baik. Pemberian insentif berupa uang dapat memberikan semangat kerja sehingga dapat memperlancar pekerjaan didalam menjalankan tugas seperti didalam proses pelaksanaan Musrenbang.

6. Sikap mengenai Pemberian Bonus Barang kepada Para Aparat

Pemberian bonus barang kepada para aparat merupakan suatu pemberian insentif. Hal yang dimana pemberian bonus barang ini dilakukan manakala aparatur yang bekerja di suatu instansi pemerintah telah melakukan prestasi kerja yang bagus yang memikat perhatian pemerintah.

Tabel 4.27
Tanggapan Responden mengenai Pemberian Bonus Barang kepada Para Aparat

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	5	25	6.5%	68,31%
Setuju	4	30	120	39.0%	
Ragu-Ragu	3	37	111	48.1%	
Tidak Setuju	2	2	4	2.6%	
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	3.9%	
Jumlah		**77**	**263**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap keterbukaan penyampaian informasi usulan-usulan Musrenbang sebanyak 30 orang menjawab setuju. Pemberian insentif berupa bonus barang perlu untuk memberikan semangat kerja kepada para aparatur Bappeda Kota Bandung didalam melakukan pekerjaannya. Persentase skor sebesar 68,31% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pemberian bonus uang sebagai insentif kepada para aparatur telah dilakukan dengan baik. Pemberian insentif berupa barang dapat memberikan semangat kerja sehingga dapat memperlancar pekerjaan didalam menalankan tugas seperti didalam proses pelaksanaan Musrenbang. Akumulasi mengenai indikator sikap dapat secara rinci terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.28
Akumulasi Tanggapan responden mengenai Sikap atau Kecenderungan

No	Sub Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor	Kriteria
1	Kesabaran	342	385	88,83%	Sangat Baik
2	Kesigapan	348	385	90,38%	Sangat Baik
3	Pengangkatan	325	385	84,41%	Sangat Baik
4	Pemilihan	309	385	80,25%	Baik
5	Uang	265	385	68,83%	Baik
6	Barang	263	385	68,31%	Baik
Total		**1852**	**2310**		

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{1852}{2310} \times 100\%$$

% Skor Aktual = 80.17%

Sikap atau kecenderungan aparat Bappeda Kota Bandung didalam menjalankan tugas dan kewajibannya khususnya didalam pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung pada tahun 2011 telah menunjukkan sikap yang baik. Hal ini terlihat pada perhitungan di atas mencapai 80.17% yang termasuk kedalam kriteria baik. Persentase skor tertinggi mengenai kesigapan aparat didalam melaksanakan Musrenbang sebesar 90,38% yang terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kesigapan aparat seperti didalam mempersiapkan keperluan Musrenbang seperti menyiapkan sarana maupun prasarana seperti tempat maupun alat-alat teknis telah dilakukan dengan sangat baik. Kesigapan aparat Bappeda Kota Bandung telah dilakukan dengan baik sehingga berbagai kegiatan seperti Musrenbang dapat terealisasi dengan maksimal.

Sikap yang merupakan karakteristik yang menempel erat pada aparatur didalam Pelaksanaan Musrenbang tahun ini diselenggarakan dengan baik. Sikap aparatur Bappeda Kota Bandung telah terlaksana dengan mematuhi himbauan atasan maupun ketentuan yang belaku. Hal ini patut untuk dapat terus dipertahankan didalam pelaksanaannya supaya pelaksanaan Musrenbang di tahun berikutnya tetap terlaksana dengan baik.

4.1.4 Struktur Birokrasi Bappeda Kota Bandung

Struktur birokrasi merupakan sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Struktur birokrasi di Bappeda Kota Bandung pun kurang lebih seperti penjelasan tersebut yaitu yang memiliki departemen fungsional, wewenang yang terpusat maupun didalam pengambilan keputusan yang terkomando oleh seorang pimpinan. Ruang lingkup struktur birokrasi dalam hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Struktur Birokrasi mengenai Pengoptimalan Waktu didalam Melaksanakan Musrenbang**

   Pengoptimalan waktu didalam melaksanakan Musrenbang merupakan suatu upaya untuk lebih memanfaatkan waktu sebaik mungkin didalam pelaksanaan Musrenbang sehingga Musrenbang dapat terselenggarakan dengan

lebih efektif dan efisien. Hal ini sangat penting perannya didalam melaksanakan tugas dan kewajiban seorang aparatur Negara khususnya aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menyelenggarakan Musrenbang.

Tabel 4.29
Tanggapan Responden mengenai Pengoptimalan Waktu didalam Melaksanakan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	36	180	46.8%	89,35%
Setuju	4	41	164	53.2%	
Ragu-Ragu	3	0	0	0.0%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**344**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pengoptimalan waktu didalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 41 orang menjawab setuju. Pengoptimalan waktu sangat diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat termanfaatkan dengan baik. Persentase skor sebesar 89,35% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pengoptimalan waktu didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Pengoptimalan waktu tersebut seperti tindakan yang tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk hal lain di luar dari materi Musrenbang. Pengoptimalan waktu tersebut sehingga membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

2. Struktur Birokrasi mengenai Pengotimalan Sumber daya yang Ada dalam Melaksanakan Musrenbang

Pengoptimalan sumber daya yang ada dalam melaksanakan Musrenbang merupakan pemanfaatan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu yang ada. Hal tersebut baik yang bersifat fisik maupun non fisik untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Musrenbang supaya pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lebih baik dan benar sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang kondusif dan terkendali.

Tabel 4.30
Tanggapan Responden mengenai Pengoptimalan Sumber Daya dalam Melaksanakan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	31	155	40.3%	85,97%
Setuju	4	38	152	49.4%	
Ragu-Ragu	3	8	24	10.4%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**331**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pengoptimalan sumber daya didalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 38 orang menjawab setuju. Pengoptimalan sumber daya sangat diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat terealisasi dengan baik. Persentase skor sebesar 85,97% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pengoptimalan sumber daya didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin. Pengoptimalan sumber daya tersebut seperti tindakan yang

tidak menyia-nyiakan peralatan yang telah dipersiapkan seperti alat komunikasi dan lainnya didalam menunjang pelaksanaan Musrenbang. Pengoptimalan sumber daya tersebut sehingga membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

3. Struktur Birokrasi mengenai Pembagian Tugas didalam Melaksanakan Musrenbang

Pembagian tugas didalam melaksanakan Musrenbang merupakan upaya pelaksanaan suatu tugas supaya lebih terstruktur dan lebih cepat. Hal ini merupakan strategi yang efektif didalam banyak kegiatan supaya kegiatan tersebut dapat lebih mudah dikerjakan serta lebih mudah terselesaikan.

Tabel 4.31
Tanggapan Responden mengenai Pembagian Tugas didalam Melaksanakan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	21	105	27.3%	82,85%
Setuju	4	46	184	59.7%	
Ragu-Ragu	3	10	30	13.0%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**319**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pembagian tugas didalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 46 orang menjawab setuju. Pembagian tugas didalam melaksanakan Musrenbang sangat diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat dilakukan lebih tepat guna. Persentase skor sebesar 82,85% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pembagian tugas didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan

sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan membuat suatu pembagian tugas seperti tugas mempersiapkan perlengkapan persyaratan teknis. Pembagian tugas tersebut sehingga memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

4. Struktur Birokrasi mengenai Pembagian Kewajiban didalam Melaksanakan Kebijakan

Pembagian kewajiban didalam melaksanakan kebijakan merupakan pembagian urusan aparatur Bappeda Kota Bandung didalam melaksanakan kebijakan. Hal ini merupakan upaya untuk mengorganisir berbagai kegiatan yang dilakukan aparat supaya bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.32
Tanggapan Responden mengenai Pembagian Kewajiban didalam Melaksanakan Kebijakan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	30	150	39.0%	85,97%
Setuju	4	40	160	51.9%	
Ragu-Ragu	3	7	21	9.1%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**331**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pembagian kewajiban didalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 40 orang menjawab setuju. Pembagian kewajiban didalam melaksanakan Musrenbang sangat diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Persentase skor sebesar 85,97% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria

penilaian tersebut mengartikan bahwa pembagian kewajiban didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan membuat suatu pembagian kewajiban seperti mempersiapkan diri untuk dapat hadir dalam menjalankan tugas. Pembagian kewajiban tersebut sehingga memperlancar proses pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi dapat diakumulasikan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.33
Akumulasi Tanggapan Responden mengenai Struktur Birokrasi

No	Sub Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor	Kriteria
1	Optimalisasi Waktu	344	385	89,35%	Sangat Baik
2	Optimalisasi Sumber daya	331	385	85,97%	Sangat Baik
3	Pembagian Tugas	319	385	82,85%	Baik
4	Pembagian Kewajiban	331	385	85,97%	Sangat Baik
Total		**1325**	**1540**		

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{1325}{1540} \times 100\%$$

% Skor Aktual = 86.04%

Struktur Birokrasi di Bappeda Kota Bandung didalam melaksanakan tugas seperti didalam menyelenggarakan Musrenbang ternilai baik. Hal ini merupakan suatu prestasi kinerja yang sangat baik, terlihat dari persentase sebesar 86.04% yang menunjukan hasil pada kriteria sangat baik. Persentase skor tertinggi yaitu mengenai pengoptimalan waktu didalam melaksanakan Musrenbang sebesar 89,35% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik.

Pengoptimalan waktu yang dilakukan aparat didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Pengoptimalan waktu tersebut seperti tindakan yang tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk hal lain di luar dari materi Musrenbang. Pengoptimalan waktu tersebut sehingga membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang. Struktur Birokrasi yang terjalin pun ikut terlaksana dengan mengoptimalkan waktu sehingga terjalin struktur birokrasi yang baik didalam pelaksanaan tugas merencanakan pembangunan di Kota Bandung.

Implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang di Bappeda Kota Bandung di ukur dengan empat sub variable yaitu diantaralain Komunikasi, Sumber daya, Sikap, dan Struktur birokrasi. Keempat ini memperoleh hasil persentase dengan rata-rata sebesar 83.47% yang menunjukkan bahwasanya implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang di Bappeda Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik, seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.34
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel X

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Komunikasi	1954	2310	84.59%	Sangat Baik
2	Sumber daya	3199	3850	83.09%	Baik
3	Sikap	1852	2310	80.17%	Baik
4	Struktur Birokrasi	1325	1540	86.04%	Sangat Baik
Total		**8330**	**10010**	**83.47%**	**Baik**

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

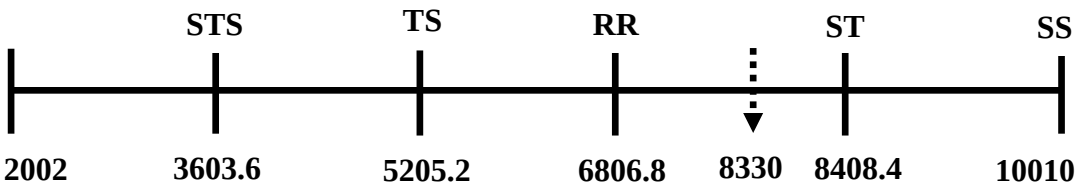
Tabel rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang di Bappeda Kota Bandung seperti yang tertera pada tabel di atas menunjukkan hasil pada kriteria yang baik. Persentase tertinggi mengenai struktur birokrasi sebesar 86,04% yang termasuk ke dalam kriteria penilaian yang sangat baik. Struktur Birokrasi yang terjalin pun ikut terlaksana dengan mengoptimalkan waktu sehingga terjalin struktur birokrasi yang baik didalam pelaksanaan tugas merencanakan pembangunan di Kota Bandung. Pengoptimalan waktu yang dilakukan aparat didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pengoptimalan waktu tersebut seperti tindakan yang tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk hal lain di luar dari materi Musrenbang. Struktur birokrasi yang diterapkan dengan optimalisasi waktu tersebut sehingga membantu membantu memperlancar berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang.

Perhitungan berikutnya yaitu mencari titik daerah skor aktual pada garis kontinum. Perhitungan untuk menentukan posisi nilai variabel X dengan jumlah skor responden sebesar 8330 terletak pada daerah yang mana maka dibuat ketentuan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Nilai Min: $1 \times 26 \times 77 = 2002$ Nilai Max: $5 \times 26 \times 77 = 10010$

Range: 10010-2002 = 8008 Jenjang Range: 8008:5 = 1601.6

Secara kontinum, dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum di atas maka pernyataan variabel X terdapat di daerah “Setuju”, maka sebagian besar responden setuju mengenai implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang di Bappeda Kota Bandung pada saat ini.

4.2 Hasil Analisis Kualitas Pelayanan Aparatur Bappeda Kota Bandung

Sebanyak 19 butir pernyataan mengenai kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung yang diajukan kepada responden untuk menilai bagaimana performa aparat di Bappeda Kota Bandung dalam pelaksanaan Musrenbang. Angket terdiri dari 3 sub variabel , yaitu sistem pelayanan, kultur organisasi, dan SDM yang berorientasi pada pelayanan.

4.2.1 Sistem Pelayanan Bappeda Kota Bandung

Sistem pelayanan merupakan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait. Hal ini bermanfaat sekali didalam pengadaan pelayanan disetiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menjalankan fungsinya.

1. **Sistem Pelayanan mengenai Penerimaan Masukan dalam Melaksanakan Musrenbang**

   Penerimaan masukan dalam melaksanakan Musrenbang merupakan suatu sistem untuk menjaring aspirasi untuk masukan kepada aparat Bappeda didalam melaksanakan Musrenbang. Hal ini bermanfaat untuk perbaikan didalam

melaksanakan Musrenbang sehinggga supaya Musrenbang seterusnya dapat dilakukan dengan lebih baik dari sebelumnya.

Tabel 4.35
Tanggapan Responden mengenai Penerimaan Masukan dalam Melaksanakan Musrebang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	35	175	45.5%	88,83%
Setuju	4	41	164	53.2%	
Ragu-Ragu	3	1	3	1.3%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**342**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap penerimaan masukan dalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 41 orang menjawab setuju. Penerimaan masukan diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat terlaksana dengan harmonis. Persentase skor sebesar 88,83% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa penerimaan masukan dalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan memperhatikan masukan-masukan seperti usulan yang dipaparkan peserta Musrenbang. Usulan tersebut seperti usulan pembuatan bak sampah dan pembangunan jembatan. Penerimaan masukan tersebut telah membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang. Penerimaan masukan dari peserta Musrenbang membuat aparat lebih mengetahui berbagai persoalan yang harus dikerjakan dengan lebih baik.

2. Sistem Pelayanan mengenai Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Musrenbang dengan Prosedur yang ditetapkan

Kesesuaian pelaksanaan pelayanan Musrenbang perlu dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini supaya didalam pelaksanaan musrenbang tercipta suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan dengan baik.

Tabel 4.36
Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Musrenbang dengan Prosedur yang ditetapkan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	22	110	28.6%	83,90%
Setuju	4	50	200	64.9%	
Ragu-Ragu	3	3	9	3.9%	
Tidak Setuju	2	2	4	2.6%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**323**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesesuaian pelaksanaan pelayanan Musrenbang dengan prosedur yang ditetapkan sebanyak 50 orang menjawab setuju. Kesesuaian pelaksanaan pelayanan Musrenbang dengan prosedur yang ditetapkan diperlukan untuk dpat dilakukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat terlaksana dengan baik. Persentase skor sebesar 83,90% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan Musenbang telah dilakukan dengan sangat memperhatkan prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut seperti memperhatikan tata cara pelaksanaan Musrenbang seperti yang tercantum pada buku pedoman Musrenbang.

Sistem pelayanan dapat diakumulasikan secara rinci yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.37
Akumulasi Tanggapan Responden mengenai Sistem Pelayanan

No	Sub Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor	Kriteria
1	Masukan	344	385	88,83%	Sangat Baik
2	Prosedur	331	385	83,90%	Baik
Total		**675**	**770**		

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{675}{770} \times 100\%$$

% Skor Aktual = 87.66%

Sistem pelayanan di Bappeda Kota Bandung tentang perencanaan pembangunan khususnya dalam hal ini ialah didalam penyelenggaraan Musrenbang Kota Bandung di tahun 2011 telah menunjukkan ketertiban dengan memperlihatkan pelayanannya didalam menyelenggarakan dan melaksanakan Musrenbang Kota Bandung dengan antusias dan penuh rasa tanggung jawab. Pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik dan benar dengan memperhatikan ketentuan serta prosedur yang berlaku sehingga membuahkan hasil yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan perhitungan persentase skor aktualnya yang mencapai angka 87.66% yang termasuk kedalam kriteria sangat baik.

Penerimaan masukan didalam melaksanakan Musrenbang mempunyai persentase skor tertinggi sebesar 88,83% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Penerimaan masukan dalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan memperhatikan masukan-masukan seperti usulan yang dipaparkan peserta Musrenbang. Usulan

tersebut seperti usulan pembuatan bak sampah dan pembangunan jembatan. Penerimaan masukan tersebut telah membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang. Aparat telah melakukan sistem pelayanan dengan memperhatikan masukan dari usulan-usulan Musrebang sehingga sistem pelayanan terjalin dengan sangat baik di Bappeda Kota Bandung.

4.2.2 Kultur Organisasi Bappeda Kota Bandung

Kultur organisasi merupakan kesepakatan bersama tentang nilai yang dianut bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Kultur organisasi yang baik akan mengantarkan suatu proses pekerjaan yang lebih mudah serta harmonis.

1. **Kultur Organisasi mengenai Penerapan Peraturan yang Berlaku dalam Melakukan Pelayanan Musrenbang**

Penerapan peraturan yang berlaku dalam melakukan pelayanan Musrenbang merupakan hal yang amat penting. Hal ini karena Musrenbang merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kultur organisasi dapat membawa perubahan maupun suasana pekerjaan menjadi lebih baik.

Tabel 4.38
Tanggapan Responden mengenai Penerapan Peraturan yang Berlaku dalam Melakukan Pelayanan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	30	150	39.0%	87,79%
Setuju	4	47	188	61.0%	
Ragu-Ragu	3	0	0	0.0%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**338**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap penerapan peraturan yang berlaku dalam melakukan pelayanan Musrenbang sebanyak 47 orang menjawab setuju. Penerapan peraturan yang berlaku dalam melakukan pelayanan Musrenbang diperlukan supaya dalam pelaksanaanya dapat terlaksanan dengan baik. Persentase skor sebesar 87,79% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah memperhatikan peraturan yang berlaku dan terlaksana dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan sangat memperhatikan peraturan yaitu dengan melihat pedoman pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang telah mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan pedoman pelaksanaan Musrenbang sehingga hal itu sangat memperlancar jalannya pelaksanaan Musrenbang.

2. Kultur organisasi mengenai Pendisiplinan Diri didalam melakukan Pelayanan Musrenbang

Pendisiplinan diri didalam melakukan pelayanan Musrenbang merupakan suatu hal yang diharapkan. Hal ini mengingat disiplin ialah sumber ketertiban dan keteraturan yang akan membawa kepada pencapaian keberhasilan. Disiplin adalah salah-satu cara aparatur Bappeda untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya supaya tugas dan kewajibannya dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.39
Tanggapan Responden mengenai Pendisiplinan Diri didalam Melakukan Pelayanan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	15	75	19.5%	81,30%
Setuju	4	53	212	68.8%	
Ragu-Ragu	3	8	24	10.4%	
Tidak Setuju	2	1	2	1.3%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**313**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap pendisilinan diri didalam melakukan pelayanan Musrenbang sebanyak 53 orang menjawab setuju. Pelaksanaan Musrenbang dengan pendisiplinan diri diperlukan supaya pelaksanaannya dapat terlaksanan dengan baik. Persentase skor sebesar 81,30% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pendisiplinan diri telah dilakukan didalam melakukan pelayanan Musrenbang seperti didalam mengurus usulan-usulan Musrenbang telah dilakukan dengan

sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan pendisiplinan diri yang amat baik sehingga membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

3. Kultur Organisasi mengenai Penerapan Ilmu tentang Pelayanan Musrenbang

Penerapan ilmu tentang pelayanan Musrenbang merupakan suatu terapan ilmu mengenai pedoman penyelenggaraan Musrenbang. Hal itu supaya aparatur Bappeda Kota Bandung didalam melaksanakan Musrenbang sesuai dengan prosedur serta ketentuan seperti yang telah tercantum pada pedoman Musrenbang.

Tabel 4.40
Tanggapan Responden mengenai Penerapan Ilmu tentang Pelayanan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	30	150	39.0%	83,38%
Setuju	4	30	120	39.0%	
Ragu-Ragu	3	17	51	22.1%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**321**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap penerapan ilmu tentang pelayanan Musrenbang sebanyak 30 orang menjawab setuju. Pelaksanaan Musrenbang perlu memperhatikan terapan ilmu sperti yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan Musrenbang supaya dapat terlaksana dengan baik. Persentase skor sebesar 83,38% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah dilakukan dengan memperhatikan ilmu terapan seperti yang tercantum pada buku pedoman

pelaksanaan Musrenbang dan dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan penerapan ilmu tentang pelayanan Musrenbang seperti yang telah tercantum pada pedoman pelaksanaan Musrenbang sehingga membantu memudahkan proses pelaksanaan Musrenbang.

4. Kultur Organisasi mengenai Saling Dukung Aparat didalam Melaksanakan Musrenbang

Saling dukung aparat didalam melaksanakan Musrenbang merupakan kultur yang penting untuk dapat terus dilakukan, karena hal ini menyangkut kekompakan dan kerjasama setiap aparatur didalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya, terlebih didalam menyelenggarakan dan melaksanakan proses Musrenbang Kota Bandung yang memerlukan kerjasama yang solid supaya pengerjaannya dapat dilakukan dengan lebih baik.

Tabel 4.41
Tanggapan Responden mengenai Saling Dukung Aparat didalam Melaksanakan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	26	130	33.8%	80,52%
Setuju	4	38	152	49.4%	
Ragu-Ragu	3	2	6	2.6%	
Tidak Setuju	2	11	22	14.3%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**310**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap saling dukung aparat didalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 38 orang menjawab setuju. Saling dukung aparat didalam melaksanakan Musrenabng sangat diperlukan supaya

pelaksanaannya seperti informasi usulan-usulan Musrenbang tetap dapat berjalan dengan baik. Persentase skor sebesar 80,52% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa saling dukung aparat didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan saling dukung aparat didalam bekerjasama menyelesaikan kegiatan-kegiatan seperti pengolahan data usulan Musrenbang. Kerjasama aparat tersebut didalam pelaksanaannya telah mempermudah proses pelaksanaan Musrenbang.

5. Kultur Organisasi mengenai Penekanan Ego didalam Melaksanakan Musrenbang

Penekanan ego didalam melaksanakan Musrenbang merupakan upaya untuk menekan keegoisan. Hal itu supaya para aparat tidak bekerja perorangan dan mementingkan diri sendiri akan tetapi secara bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajibannya yang merupakan kepentingan bersama tersebut.

Tabel 4.42
Tanggapan Responden mengenai Penekanan Ego didalam Melaksanakan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	22	110	28.6%	80,00%
Setuju	4	36	144	46.8%	
Ragu-Ragu	3	16	48	20.8%	
Tidak Setuju	2	3	6	3.9%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**308**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap penekanan ego didalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 36 orang menjawab setuju. Penekanan ego sangat diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan baik. Persentase skor sebesar 80,00% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa penekanan ego didalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan secara bersama-sama tanpa mementingkan keperluan individu. Penekanan ego yang dilakukan aparat berperan penting didalam melakukan pelayanan khususnya didalam melakukan pelayanan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang dengan tidak mementingkan diri sendiri tersebut telah membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

6. Kultur Organisasi mengenai Penciptaan Keharmonisan Aparat dalam Melaksanakan Pelayanan Musrenbang

Penciptaan keharmonisan aparat dalam melaksanakan pelayanan Musrenbang merupakan hal yang dibilang perlu karena hal ini perannya cukup mempengaruhi situasi dan kondisi didalam melaksanakan Musrenbang. Upaya untuk lebih didalam pencapaian keberhasilan tentu diharapkan supaya hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Tabel 4.43
Tanggapan Responden mengenai Penciptaan Keharmonisan Aparat dalam Melaksanakan Pelayanan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	28	140	36.4%	84,16%
Setuju	4	38	152	49.4%	
Ragu-Ragu	3	10	30	13.0%	
Tidak Setuju	2	1	2	1.3%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**324**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap penciptaan keharmonisan aparat dalam melaksanakan pelayanan Musrenbang sebanyak 38 orang menjawab setuju. Penciptaan keharmonisan aparat dalam melaksanan pelayanan Musrenbang diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat terlaksana dengan baik. Persentase skor sebesar 84,16% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa didalam melaksanakan Musrenbang aparat telah menciptakan keharmonisan dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan penciptaan keharmonisan aparat. Penciptaan keharmonisan tersebut menjaga supaya kondisi pelaksanaan dapat tetap terjaga secara kondusif dan terkendali. Pelaksanaan Musrenbang dapat terlaksana secara harmonis sehingga memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

7. Kultur Organisasi mengenai Kesesuaian Tugas Aparat dengan Fungsinya Masing-Masing

Kesesuaian tugas aparat dengan fungsinya masing-masing merupakan suatu kultur yang penting untuk dapat terus dilakukan. Hal itu supaya tidak terdapat tumpang tindih fungsi aparat didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Tabel 4.44
Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Tugas Aparat dengan Fungsinya Masing-Masing

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	23	115	29.9%	82,86%
Setuju	4	42	168	54.5%	
Ragu-Ragu	3	12	36	15.6%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**319**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesesuaian tugas aparat dengan fungsinya masing-masing sebanyak 42 orang menjawab setuju. Kesesuaian tugas aparat dengan fungsinya masing sangat diperlukan supaya pelaksanaan Musrenbang dapat terlaksana secara baik dan benar. Persentase skor sebesar 82,86% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesesuaian tugas aparat dengan fungsinya masing-masing dilakukan dengan baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan tugas dan fungsinya masing-masing aparat. Pelaksanaan tersebut seperti menjalankan tugas mempersiapkan peralatan maupun mengunggah data. Pelaksanaan yang seperti itu sehingga memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

8. Kultur Organisasi Mengenai Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam Menunjang Pekerjaan Aparat

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pekerjaan aparat merupakan hal yang sangat penting untuk dapat direalisasikan. Ketersediaan sarana dan prasaranan yang memadai tentu akan sangat mempengaruhi suatu kegiatan untuk dapat dikerjakan.

Tabel 4.45
Tanggapan Responden mengenai Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam Menunjang Pekerjaan Aparat

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	30	150	39.0%	86,23%
Setuju	4	41	164	53.2%	
Ragu-Ragu	3	6	18	7.8%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**332**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pekerjaan aparat sebanyak 41 orang menjawab setuju. Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pekerjaan aparat sangat diperlukan supaya pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Persentase skor sebesar 86,23% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pekerjaan aparat telah tercukupi dengan sangat baik. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut telah menunjang berbagai pekerjaan aparat sehingga membantu memperlancar proses pekerjaaan seperti didalam melakukan pelaporan maupun tugas mengolah data hasil Musrenbang.

9. Kultur Organisasi mengenai Ketersediaan Jenjang Karir yang Jelas kepada Aparat

Ketersediaan jenjang karir yang jelas kepada aparat merupakan hak para aparatur dan hal ini pun merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jenjang karir yang jelas tentu sangat diharapkan oleh setiap aparat supaya dapat memenuhi kesejahteraan para aparat itu sendiri.

Tabel 4.46
Tanggapan Responden mengenai Ketersediaan Jenjang Karir yang Jelas kepada Aparat

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	24	120	31.2%	81,30%
Setuju	4	35	140	45.5%	
Ragu-Ragu	3	17	51	22.1%	
Tidak Setuju	2	1	2	1.3%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**313**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap ketersediaan jenjang karir yang jelas kepada aparat sebanyak 35 orang menjawab setuju. Jenjang karir yang jelas kepada aparat sangat diperlukan karena merupakan ketetapan untuk memenuhi kesejahteraan para aparat. Persentase skor sebesar 81,30% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa ketersediaan jenjang karir yang jelas kepada para aparat telah terpenuhi dengan baik. Ketersediaan jenjang karir yang jelas kepada apara aparat telah membantu memenuhi kebutuhan aparat sehingga pekerjaan dilakukan dengan semangat serta membantu memperlancar proses pekerjaaan seperti didalam melakukan pelaporan maupun pendokumentasian hasil Musrenbang.

Kultur organisasi dapat diakumulasikan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.47
Akumulasi Tanggapan Responden mengenai Kultur Organisasi

No	Sub Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor	Kriteria
1	Peraturan	338	385	87,79%	Sangat Baik
2	Disiplin	313	385	81,30%	Baik
3	Ilmu	321	385	83,38%	Baik
4	Motivasi	310	385	80,52%	Baik
5	Ego	308	385	80,00%	Baik
6	Harmonis	324	385	84,16%	Sangat Baik
7	Sesuai Fungsi	319	385	82,86%	Baik
8	Sarana dan Prasarana	332	385	86,23%	Sangat Baik
9	Jenjang Karir	313	385	81,30%	Baik
Total		**2878**	**3465**		

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{2878}{3465} \times 100\%$$

% Skor Aktual = 83.06%

Kultur organisasi di Bappeda Kota Bandung didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya khususnya didalam menyelenggarakan Musrenbang Kota Bandung tahun 2011 ini telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat jelas pada pada hasil perhitungan di atas yang mencapai hasil persentase sebesar 83.06% yang termasuk pada kriteria baik. Kultur organisasi yang dilaksanakan didalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2011 oleh aparatur Bappeda Kota Bandung telah menciptakan kondisi yang kondusif sehingga menghasilkan proses kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan peraturan yang berlaku dalam melakukan pelayanan Musrenbang memperoleh persentase skor tertinggi sebesar 87,79% yang terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang telah memperhatikan peraturan yang berlaku dan terlaksana dengan sangat baik. Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan sangat memperhatikan peraturan yaitu dengan melihat pedoman pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang telah mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan pedoman pelaksanaan Musrenbang. Penerapan peraturan yang berlaku dalam melakukan pelayanan Musrenbang merupakan kultur organisasi yang telah diterapkan dengan baik di Bappeda Kota Bandung.

4.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berorientasi pada Pelayanan di Bappeda Kota Bandung

Sumber daya manusia yang berorientasi pada pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diadakan mengingat hal ini merupakan sesuatu yang amat menunjang berbagai kegiatan dan keperluan Bappeda Kota Bandung didalam menjalankan fungsinya. Adapun ruang lingkup sumber daya mansia yang berorientasi pada pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Tanggap dalam Melaksanakan Musrenbang**

Tanggap dalam melaksanakan Musrenbang merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh aparatur Bappeda Kota Bandung supaya didalam

pelaksanaannya dapat secara cepat dan lancar dikerjakan. Sikap tanggap merupakan hal yang dipandang sebagai profesionalitas kerja sehingga didalam penerapannya dalam pelaksanaan Musrenbang benar-benar diharapkan.

Tabel 4.48
Tanggapan Responden mengenai Tanggap dalam Melaksanakan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	22	110	28.6%	84,68%
Setuju	4	51	204	66.2%	
Ragu-Ragu	3	4	12	5.2%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**326**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap tanggap dalam melaksanakan Musrenbang sebanyak 51 orang menjawab setuju. Sikap tanggap aparat didalam melaksanakan Musrenbang sangat diharapkan supaya pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik dan benar. Persentase skor sebesar 84,68% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa sikap tanggap aparat didalam melaksanakan Musrenbang sangat baik. Sikap tanggap aparat didalam melaksanakan Musrenbang seperti tanggap memperhatikan proses pelaksanaan maupun didalam menyampaikan materi Musrenbang. Sikap tanggap tersebut telah membantu memperlancar proses pekerjaaan Musrenbang. Sikap tanggap aparat pun telah menghasilkan suatu hasil pelaksanaan Musrenbang yang benar-benar kondusif.

2. SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Perumusan Kembali Pelaksanaan Musrenbang

Perumusan kembali pelaksanaan Musrenbang merupakan suatu pengujian aparat untuk dapat dikatakan sebagai pekerja handal. Perumusan ini merupakan sebagai pemantapan aparat sehingga aparat dapat dikatakan sebagai tenaga ahli profesional didalam melaksanakan Musrenbang.

Tabel 4.49
Tanggapan Responden mengenai Perumusan Kembali Pelaksanaan Musrenbang

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	32	160	41.6%	86,75%
Setuju	4	39	156	50.6%	
Ragu-Ragu	3	6	18	7.8%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**334**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap perumusan kembali pelaksanaan Musrenbang sebanyak 39 orang menjawab setuju. Aparat diharapkan dapat merumuskan kembali pelaksanaan Musrenbang untuk menguji kehandalan atau kemampuan aparat didalam menyelenggarakan Musrenbang. Persentase skor sebesar 86,75% terdapat pada kriteria penilaian yang sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa perumusan kembali pelaksanaan Musrenbang dapat dilakukan oleh aparat dengan sangat baik. Aparat dapat merumuskan kembali pelaksanaan Musrenbang. Perumusan kembali pelaksanaan Musrenbang tersebut telah membantu memperlancar proses pekerjaaan seperti didalam melakukan persiapan maupun pelaporan data hasil Musrenbang.

3. SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Kesetiaan Mengemban Amanat yang diberikan

Kesetiaan mengemban amanat yang diberikan merupakan hal perlu untuk dilakukan. Hal ini karena amanat merupakan suatu kewajiban yang diberikan yang perlu untuk selalu di kerjakan dengan baik dan benar.

Tabel 4.50
Tanggapan Responden mengenai Kesetiaan Mengemban Amanat yang diberikan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	25	125	32.5%	83,38%
Setuju	4	42	168	54.5%	
Ragu-Ragu	3	8	24	10.4%	
Tidak Setuju	2	2	4	2.6%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**321**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden kesetiaan mengemban amanat yang diberikan sebanyak 42 orang menjawab setuju. Amanat sangat penting untuk dapat diemban dengan baik supaya tugas serta kewajiban aparatur dapat terpenuhi. Persentase skor sebesar 83,38% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa aparatur Bappeda Kota Bandung telah dapat mengemban amanat yang diberikan didalam melaksanakan Musrenbang dengan baik. Kesetiaan mengemban amanat yang diberikan seperti perencanaan pembangunan dalam hal Musrenbang dapat dilakukan dengan baik. Kesetiaanmengemban amanat tersebut telah membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang. Kesetiaan mengemban amanat para aparatur Bappeda

Kota Bandung telah dapat terlaksana dengan memperhatikan segala ketentuan sehingga dapat melaksanakan Musrenbang dengan baik.

4. SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Kepatuhan didalam Menjalankan Kewajibannya

Kepatuhan didalam menjalankan kewajiban merupakan suatu tindakan dan perilaku atau pun loyalitas yang patut untuk dapat diimplementasikan supaya berbagai tugas yang merupakan kewajibannya dapat terus dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini pun diharapkan supaya perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan tepat guna.

Tabel 4.51
Tanggapan Responden mengenai Kepatuhan didalam Menjalankan Kewajibannya

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	16	80	20.8%	81,56%
Setuju	4	51	204	66.2%	
Ragu-Ragu	3	10	30	13.0%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**314**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kepatuhan didalam menjalankan Musrenbang sebanyak 51 orang menjawab setuju. Sikap patuh aparat didalam melaksanakan Musrenbang sangat diharapkan supaya pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik dan benar. Persentase skor sebesar 81,56% terdapat pada kriteria penilaian yang baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa sikap patuh aparat didalam melaksanakan Musrenbang dapat dilakukan dengan baik.

Sikap patuh aparat didalam melaksanakan Musrenbang seperti patuh memberikan pelayanan didalam memberikan pengertian ataupun informasi mengenai Musrenbang. Sikap patuh tersebut telah membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

5. SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Kesesuaian Pelayanan dengan Ketentuan yang Berlaku

Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan yang berlaku merupakan suatu hal yang penting. Hal ini karena didalam melakukan pelayanan menyelenggarakan Musrenbang tentunya harus memperhatikan ketentuan maupun prosedur yang berlaku supaya Musrenbang dapat dijalankan menurut peraturan yang ditetapkan.

Tabel 4.52
Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Pelayanan dengan Ketentuan yang Berlaku

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	50	250	64.9%	92,99%
Setuju	4	27	108	35.1%	
Ragu-Ragu	3	0	0	0.0%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**358**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesesuaian pelayanan dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 27 orang menjawab setuju. Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan yang berlaku diperlukan supaya pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik dan benar. Persentase skor sebesar 92,99% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesesuaian

pelayanan dengan ketentuan yang berlaku didalam melaksanakan Musrenbang dapat dilakukan dengan sangat baik. Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan yang berlaku didalam melaksanakan Musrenbang yaitu dengan berpedoman kepada tata pelaksanaan Musrenbang. Kesesuaian pelayanan tersebut telah membantu memperlancar proses pekerjaaan sehingga Musrenbang dapat terealisasi dengan baik.

6. SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Kesesuaian Informasi dengan Fakta yang Ada

Kesesuaian informasi dengan fakta yang ada merupakan faktor yang sangat berperan. Hal ini karena informasi ialah salah-satu kunci keberhasilan disetiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap orang, termasuk informasi untuk aparatur Bappeda Kota Bandung didalam menjalankan fungsinya.

Tabel 4.53
Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Informasi dengan Fakta yang Ada

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	29	145	37.7%	87,53%
Setuju	4	48	192	62.3%	
Ragu-Ragu	3	0	0	0.0%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**337**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesesuaian informasi dengan fakta yang ada sebanyak 48 orang menjawab setuju. Kesesuaian informasi dengan fakta yang ada diperlukan supaya Musrenbang dapat terlaksana dengan benar dan jujur.

Persentase skor sebesar 87,53% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesesuaian informasi dengan fakta yang didalam melaksanakan Musrenbang dapat dilakukan dengan sangat baik. Kesesuaian informasi dengan fakta yang ada didalam melaksanakan Musrenbang seperti data-data dokumentasi yang telah diolah hasil pelaksanaan Musrenbang. Kesesuaian informasi dengan fakta yang ada tersebut telah membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang.

7. SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Penyamarataan Kualitas Pelayanan yang Akan diberikan

Penyamarataan kualitas pelayanan yang akan diberikan merupakan suatu tindakan dan perilaku yang sangat terpuji serta patut untuk dapat diimplementasikan. Hal ini supaya pengerjaan suatu aktivitas pekerjaan dapat dirasakan secara baik oleh bersama.

Tabel 4.54
Tanggapan Responden mengenai Penyamarataan Kualitas Pelayanan yang Akan diberikan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	24	120	31.2%	85,71%
Setuju	4	51	204	66.2%	
Ragu-Ragu	3	2	6	2.6%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**330**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap penyamarataan kualitas pelayanan yang akan diberikan sebanyak 51 orang menjawab setuju. Penyamarataan kualitas

pelayanan yang akan diberikan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dirasakan baik oleh semua. Persentase skor sebesar 85,71% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa penyamarataan kualitas pelayanan yang akan diberikan didalam melaksanakan Musrenbang dapat dilakukan dengan sangat baik. Penyamarataan tersebut membantu memperlancar proses pekerjaaan Musrenbang. Aparat telah dapat memberikan kualitas pelayanan yang sama sehingga proses pelaksanaan Musrenbang dapat terealisasi dengan penuh kejujuran.

8. SDM yang Berorientasi pada Pelayanan mengenai Kesesuaian Pelayanan dengan Kaidah yang Berlaku

Kesesuaian pelayanan dengan kaidah yang berlaku merupakan suatu hal yang menjadi tumpuan dikarenakan kaidah dipandang secara normatif dapat membuat berbagai pekrjaan menjadi teratur dan tertib. Pelayanan yang dalam hal ini Musrenbang tentu diharapkan dapat berjalan secara teratur dan tertib.

Tabel 4.55
Tanggapan Responden mengenai Kesesuaian Pelayanan dengan Kaidah yang Berlaku

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase	% Skor
Sangat Setuju	5	24	120	31.2%	85,71%
Setuju	4	51	204	66.2%	
Ragu-Ragu	3	2	6	2.6%	
Tidak Setuju	2	0	0	0.0%	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0.0%	
Jumlah		**77**	**330**	**100%**	

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tanggapan responden terhadap kesesuaian pelayanan dengan kaidah yang berlaku sebanyak 51 orang menjawab setuju. Kesesuaian pelayanan dengan kaidah yang berlaku diperlukan supaya pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik dan benar. Persentase skor sebesar 85,71% terdapat pada kriteria penilaian sangat baik. Kriteria penilaian tersebut mengartikan bahwa kesesuaian pelayanan dengan kaidah yang berlaku didalam melaksanakan Musrenbang dapat dilakukan dengan sangat baik. Kesesuaian pelayanan dengan kaidah yang berlaku didalam melaksanakan Musrenbang yaitu dengan berpedoman kepada tata pelaksanaan Musrenbang. Kesesuaian pelayanan dengan kaidah tersebut telah membantu mempermudah proses pekerjaaan Musrenbang.

Sumber daya manusia yang berorientasi pada pelayanan dapat di akumulasikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.56
Akumulasi Tanggapan Responden mengenai SDM yang Berorientasi pada Pelayanan

No	Sub Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor	Kriteria
1	Tanggap	326	385	84,68%	Sangat Baik
2	Perumusan	334	385	86,75%	Sangat Baik
3	Setia	321	385	83,38%	Baik
4	Patuh	314	385	81,56%	Baik
5	Ketentuan	358	385	92,99%	Sangat Baik
6	Fakta	337	385	87,53%	Sangat Baik
7	Penyamarataan	330	385	85,71%	Sangat Baik
8	Kaidah	330	385	85,71%	Sangat Baik
Total		**2650**	**3080**		

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

% Skor Aktual = $\frac{2650}{3080} \times 100\%$

% Skor Aktual = 86.04%

Sumber daya manusia yang berorientasi pada pelayanan yang terdapat di Bappeda Kota Bandung telah memenuhi persyaratan teknis. Hal tersebut sehingga sumber daya yang berorientasi pada pelayanan ini dapat terlahir dan bekerja secara maksimal didalam menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan Musrenbang Kota Bandung tahun 2011 dengan baik dan benar. Hal ini terlihat pada hasil perhitungan dengan hasil persentase sebesar 86.04% yang merupakan kriteria yang sangat baik.

Perekapan variabel Y, yaitu Kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.57
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Y

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Sistem Pelayanan	675	770	87.66%	Sangat Baik
2	Kultur Organisasi	2878	3465	83.06%	Baik
3	SDM Pelayanan	2650	3080	86.04%	Sangat Baik
Total		**6203**	**7315**	**85.59%**	**Sangat Baik**

Sumber: data primer yang telah diolah, 2011

Tabel rekapitulasi tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung seperti yang tertera pada tabel di atas menunjukkan hasil pada kriteria yang sangat baik. Sistem pelayanan di Bappeda Kota Bandung tentang perencanaan pembangunan khususnya dalam hal ini ialah didalam penyelenggaraan Musrenbang Kota Bandung di tahun 2011 telah

menunjukkan ketertiban dengan memperlihatkan pelayanannya didalam menyelenggarakan dan melaksanakan Musrenbang Kota Bandung dengan antusias dan penuh rasa tanggung jawab. Pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik dan benar dengan memperhatikan ketentuan serta prosedur yang berlaku sehingga membuahkan hasil yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan perhitungan persentase skor aktualnya yang mencapai angka 87.66% yang termasuk kedalam kriteria sangat baik.

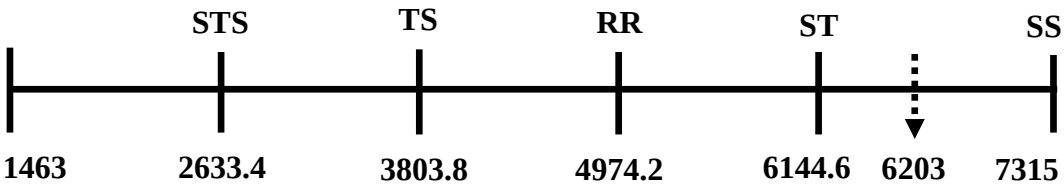
Aparat telah melakukan sistem pelayanan dengan memperhatikan masukan dari usulan-usulan Musrebang sehingga sistem pelayanan terjalin dengan sangat baik di Bappeda Kota Bandung. Sistem pelayanan yang dilakukan aparat seperti didalam penerimaan masukan tersebut telah membantu memperlancar proses pelaksanaan Musrenbang. Penerimaan masukan dalam melaksanakan Musrenbang telah dilakukan dengan sangat baik. Sistem pelayanan didalam pelaksanaan Musrenbang terealisasi dengan memperhatikan masukan-masukan seperti usulan yang dipaparkan peserta Musrenbang. Usulan tersebut seperti usulan pembuatan bak sampah dan pembangunan jembatan.

Perhitungan berikutnya yaitu mencari titik daerah skor aktual pada garis kontinum. Perhitungan untuk menentukan posisi nilai variabel Y, yaitu kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung dengan jumlah skor responden sebesar 6203 terletak terletak pada daerah yang mana maka dibuat ketentuan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Nilai Min: $1 \times 19 \times 77 = 1463$ Range: 7315-1463 = 5852

Nilai Max: $5 \times 19 \times 77 = 7315$ Jenjang Range: 5852:5 = 1170.4

Secara kontinum, dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan garis kontinum di atas maka pernyataan variabel Y terdapat di daerah "Sangat Setuju". Hal ini menunjukkan bahwasanya kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung yang dalam hal ini ialah didalam menyelenggarakan Musrenbang Kota Bandung tahun 2011 telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik dan benar.

4.3 Pengaruh Implementasi Kebijakan *e-Government* tentang penggunaan Sistem Informasi Musrenbang terhadap Kualitas Pelayanan Aparatur Bappeda Kota Bandung

Hal yang selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang dengan kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung dilakukan uji validitas serta uji reliabilitas. Berikutnya pun dilakukan analisis korelasi, pengujian hipotesis hingga perhitungan koefisien determinasi. Peneliti banyak menggunakan aplikasi komputer *IBM SPSS Statistics 19* didalam menganalisa hasil kuesioner. Hal ini supaya selain didalam perhitungan dan penganalisaan didapat hasil yang lebih cepat dan tepat.

4.3.1 Uji Vailiditas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan pengujian data-data hasil kuesioner yang mengukur sejauhmana implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang dengan kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung. Adapun pengujian tersebut dapat disimak sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas data dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan derajat kebenaran dari suatu proses pengukuran atau pengumpulan data dari instrumen penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pernyataan-pernyataan mana yang valid atau yang tidak valid dengan mengacu pada tingkat signifikan dengan nilai r_{kritis} sebesar 0,300 dimana bila r korelasi > 0,300 dinyatakan valid, sedangkan r korelasi < 0,300 dinyatakan tidak valid. Uji vaiditas ini, peneliti menggunakan program *excel* dalam tabulasi data dan memasukan data tersebut ke dalam program *IBM SPSS Statistics 19* untuk diolah lebih lanjut.

Adapun hasil uji validitas yang telah diolah menggunakan aplikasi komputer *IBM SPSS Statistics 19* sebagai berikut:

Tabel 4.58
Hasil Uji Validitas Data Variabel X

Item Pernyataan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
X1	0.384	0.300	Valid
X2	0.569	0.300	Valid
X3	0.429	0.300	Valid
X4	0.364	0.300	Valid
X5	0.413	0.300	Valid
X6	0.569	0.300	Valid
X7	0.646	0.300	Valid
X8	0.525	0.300	Valid
X9	0.570	0.300	Valid
X10	0.510	0.300	Valid
X11	0.452	0.300	Valid
X12	0.468	0.300	Valid
X13	0.592	0.300	Valid
X14	0.480	0.300	Valid
X15	0.614	0.300	Valid
X16	0.378	0.300	Valid
X17	0.327	0.300	Valid
X18	0.303	0.300	Valid
X19	0.373	0.300	Valid
X20	0.334	0.300	Valid
X21	0.387	0.300	Valid
X22	0.383	0.300	Valid
X23	0.312	0.300	Valid
X24	0.317	0.300	Valid
X25	0.340	0.300	Valid
X26	0.319	0.300	Valid

Sumber: Hasil olahan data *IBM SPSS Statistics 19*, 2011

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa semua item pernyataan menghasilkan nilai lebih besar dari nilai r kritisnya sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut valid. Item-item valid dapat digunakan dalam proses pengolahan analisis data.

Tabel 4.59
Hasil Uji Validitas Data Variabel Y

Item Pernyataan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Y1	0.390	0.300	Valid
Y2	0.430	0.300	Valid
Y3	0.354	0.300	Valid
Y4	0.394	0.300	Valid
Y5	0.497	0.300	Valid
Y6	0.448	0.300	Valid
Y7	0.303	0.300	Valid
Y8	0.379	0.300	Valid
Y9	0.321	0.300	Valid
Y10	0.422	0.300	Valid
Y11	0.575	0.300	Valid
Y12	0.306	0.300	Valid
Y13	0.323	0.300	Valid
Y14	0.395	0.300	Valid
Y15	0.366	0.300	Valid
Y16	0.323	0.300	Valid
Y17	0.315	0.300	Valid
Y18	0.334	0.300	Valid
Y19	0.355	0.300	Valid

Sumber: Hasil olahan data *IBM SPSS Statistics 19*, 2011

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa semua item pernyataan menghasilkan nilai lebih besar dari nilai r kritisnya sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut valid. Item-item valid dapat digunakan dalam proses pengolahan analisis data.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, selain itu reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu

responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pernyataan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pernyataan tersebut.

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu hasil pengukuran. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi komputer *IBM SPSS Statistics 19*. Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian menggunakan rumus *Alpha–Cronbach.* Berikut ini hasil uji realibilitas:

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	77	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	77	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	45

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap kedua variabel diperoleh hasil sebesar 0,913. Langkah berikutnya untuk mengukur reliabilitas dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = 0{,}913 \sqrt{\frac{77-2}{1-(0{,}913)^2}}$$

$$t_{hitung} = 0{,}913 \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{0{,}166}}$$

$$t_{hitung} = 19{,}406$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki kehandalan yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (19,406 > 1,922). Hal ini menyatakan bahwa alat ukur atau kuesioner dapat dipercaya atau reliabel.

4.3.2 Analisis Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Analisis hubungan antara implementasi kebijakan *e-Government* dengan kualitas pelayanan dilakukan dengan menggunakan korelasi *rank spearman*. Kegunaan dari korelasi adalah untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel X (Implementasi Kebijakan *e-Government*) dan variabel Y (Kualitas Pelayanan). Setelah hasil kuesioner diketahui maka perhitungan yang digunakan dengan metode *rank spearman* yang diolah dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 19*. Hal itu dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rho_{yx} = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N\,(N^2 - 1)}$$

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan *IBM SPSS Statistics 19*. Hal ini supaya mempermudah proses pengerjaan dan agar didapat hasil yang lebih akurat. Adapun hasilnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.60
Hasil Uji Korelasi Variabel X dan Y

Correlations

			Implementasi Kebijakan e-Government	Kualitas Pelayanan
Spearman's rho	Implementasi Kebijakan e-Government	Correlation Coefficient	1.000	.665**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	77	77
	Kualitas Pelayanan	Correlation Coefficient	.665**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	77	77

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan korelasi *rank spearman* di atas yang menunjukkan hasil sebesar 0,665 sehingga dapat dikatakan bahwasanya hubungan implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung terdapat pada tingkat hubungan yang kuat.

4.3.3 Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan akan menolak atau menerima hipotesis. Menguji variabel implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengujinya dengan analisis statistik uji t. Uji hipotesis dikemukakan dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$ "tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung."

$H_a : \beta \neq 0$ "terdapat pengaruh implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung."

Analisis uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar t_{hitung} yang akan digunakan. Adapun untuk mencarinya dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

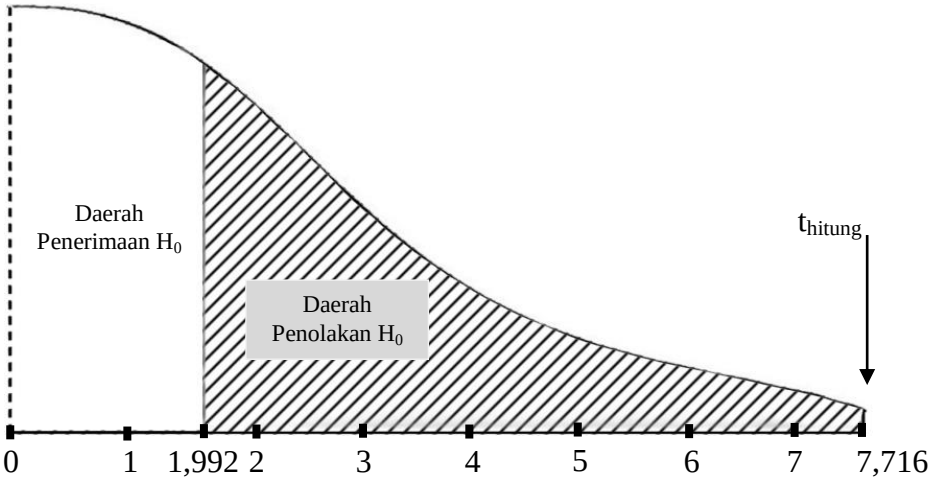
$$t_{hitung} = 0{,}665 \sqrt{\frac{77-2}{1-(0{,}665)^2}}$$

$$t_{hitung} = 0{,}665 \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{0{,}557}}$$

$$t_{hitung} = 7{,}716$$

Hasil pengolahan data di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,716. t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (α= 0,05) dan derajat kebebasannya sebesar 75 (n-2). Hal ini sehingga derajat kebebasannya yaitu sebesar 1,992 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ (7,716 > 1,992), sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



Berdasarkan hal di atas, yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ (7,716>1,992), sehingga H_0 ditolak, maka dapat dinyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung, yang dimana nilai koefisien korelasi tersebut yaitu sebesar 0,665 yang nilai tersebut menunjukan hubungan yang kuat. Nilai Koefisien korelasi hubungan tersebut bernilai positif artinya apabila implementasi kebijakan *e-Government* terus di tingkatkan maka kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung akan meningkat. Jadi dapat dinyatakan bahwasanya **"implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung".**

4.3.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase implementasi kebijakan *e-Government* terhadap kualitas pelayanan peneliti menggunakan analisis koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$KD = r^2 \times 100\%$

$KD = 0{,}665^2 \times 100\%$

$KD = 0{,}4422 \times 100\%$

$KD = 44{,}22\%$

Hasil perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan aparatur Bappeda Kota Bandung sebesar 44,22% dan sisanya sebesar 55,78% yang dipengaruhi faktor lain yang ada di luar proses implementasi kebijakan *e-Government* tentang penggunaan sistem informasi Musrenbang. Hal ini merupakan pengaruh yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pengaruh lain sebesar 55,78% yang merupakan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Faktor lain yang tidak diteliti itu seperti faktor kondisi dan suasana lingkungan pekerjaan. Kondisi yang terkadang panas atau dingin karena cuaca serta lingkungan yang terkadang ada pedagang asongan yang tiba-tiba masuk ke ruangan menawarkan barang bawaannya. Hal tersebut mempengaruhi proses pelaksanaan tugas aparat didalam melakukan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Musrenbang di Kota Bandung.